



Penerapan Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

I Gusti Ayu Legiantari¹, Ida Ayu Nyoman Sutriani²

Program Studi Manajemen Ekonomi, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
ayulegi145@gmail.com¹, dayunyoman23@gmail.com

Abstract. Regional financial management requires accountability for every use of public funds, including expenditures incurred in official business travel. Such accountability is supported by documents that demonstrate the implementation of official travel and the conformity of the expenditures incurred. This study aims to examine the implementation of financial accountability for official business travel, the conformity of expenditures with supporting documents, and its role in supporting financial management accountability at the Government Affairs Division of the Regional Secretariat of West Nusa Tenggara Province. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with an employee responsible for official business travel accountability reports and documentation in the form of accountability documents and supporting travel evidence. The results show that accountability for official business travel is carried out through the issuance of assignment letters and official travel orders, collection of travel and expenditure evidence, preparation of expense details, receipt lists, and payment receipts. The conformity of expenditures is examined by matching the type and amount of expenditures with the available supporting documents. When required documents are incomplete, they are completed, while differences in amounts are adjusted according to the identified discrepancies. Completed documents are subsequently archived to support the audit process. These findings indicate that the implementation of accountability for official business travel through document completeness and expenditure conformity can support the provision of evidence of expenditure and financial management accountability within the Government Affairs Division.

Keywords: accountability; official business travel; supporting documents; financial management; financial responsibility

Abstrak. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran, termasuk biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Pertanggungjawaban tersebut didukung oleh dokumen yang dapat menunjukkan pelaksanaan dan kesesuaian pengeluaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas, kesesuaian pengeluaran dengan dokumen pendukung, serta perannya dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang menangani SPJ perjalanan dinas dan dokumentasi berupa dokumen SPJ beserta bukti pendukung perjalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan melalui penerbitan SPT dan SPPD, pengumpulan bukti perjalanan dan pengeluaran, penyusunan rincian biaya, daftar terima uang, serta kuitansi pembayaran. Kesesuaian pengeluaran diperhatikan melalui pencocokan jenis dan nilai pengeluaran dengan dokumen pendukung yang tersedia. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, dokumen tersebut dilengkapi, sedangkan perbedaan nominal dilakukan penyesuaian sesuai selisih yang ditemukan. Dokumen yang telah lengkap kemudian diarsipkan untuk mendukung proses pemeriksaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban perjalanan dinas melalui kelengkapan dokumen dan kesesuaian pengeluaran dapat mendukung penyediaan bukti penggunaan biaya serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Bagian Pemerintahan.

Kata kunci: akuntabilitas; dokumen pendukung; pengelolaan keuangan; perjalanan dinas; pertanggungjawaban keuangan

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Ananda & Nafi'ah, 2023). Pengelolaan keuangan daerah juga mencakup proses penggunaan anggaran dan penanggungjawaban atas keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah (Astuti et al., 2024). Akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan karena pemerintah daerah perlu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelolanya (Faisal, 2025). Transparansi juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan agar informasi mengenai penggunaan keuangan pemerintah dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan (Pera et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup bagaimana dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sipahutar et al., 2024).

Salah satu bentuk penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan kedinasan serta memerlukan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas dana yang digunakan (Putri S & Susandra, 2025). Pengeluaran perjalanan dinas dapat mencakup biaya transportasi, penginapan, dan kebutuhan perjalanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Septiani & Rinanda, 2025). Setiap pengeluaran yang menggunakan anggaran pemerintah perlu didukung dengan dokumen pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran yang sah untuk menunjukkan realisasi penggunaan dana (Sumeleh et al., 2024). Pengelolaan pengeluaran perjalanan dinas perlu memperhatikan ketersediaan anggaran serta kesesuaian pembebanan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan yang berlaku (Indonesia, 2023). Pertanggungjawaban atas pengeluaran perjalanan dinas menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan karena penggunaan dana perlu dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dan pelaporan pengeluaran (Khairunnisak & Suryantara, 2025).

Surat pertanggungjawaban (SPJ) menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dalam pelaksanaan perjalanan dinas (Aulia et al., 2025). Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas

memuat berbagai bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dan pengeluaran selama kegiatan, seperti tiket, boarding pass, tagihan hotel, bukti tol, serta dokumen pendukung lainnya yang kemudian diperiksa kelengkapan dan kevalidan (Adventy et al., 2024). Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas diperlukan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan bukti yang diajukan serta kesesuaiannya dengan pengeluaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas (Sumeleh et al., 2024). Kelengkapan dokumen menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas karena dokumen pendukung digunakan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan batas anggaran yang telah ditetapkan (Ananda & Nafi'ah, 2023). Dengan adanya dokumen pertanggungjawaban yang sesuai, penggunaan anggaran perjalanan dinas dapat ditelusuri berdasarkan bukti pengeluaran yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pertanggungjawaban perjalanan dinas didukung oleh dokumen seperti Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket, boarding pass, bukti penginapan, serta bukti pengeluaran lainnya sesuai dengan jenis perjalanan dinas (Hasil Observasi, 2026). Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang menangani SPJ, apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, dokumen tersebut perlu dilengkapi sebelum proses pertanggungjawaban diselesaikan (Hasil Wawancara, 2026). Selain kelengkapan dokumen, terdapat pula pemeriksaan terhadap kesesuaian nominal antara dokumen pendukung dengan rincian biaya yang dipertanggungjawabkan (Hasil Wawancara, 2026). Apabila ditemukan perbedaan nominal, dilakukan penyesuaian berdasarkan selisih yang ditemukan agar nilai yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan dokumen pendukung (Hasil Wawancara, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian pengeluaran yang dipertanggungjawabkan dengan bukti penggunaan dan.

Penelitian terdahulu mengenai perjalanan dinas telah membahas akuntabilitas dalam penyelenggaraan SPJ perjalanan dinas pada Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur (Ananda & Nafi'ah, 2023). Penelitian lainnya membahas akuntabilitas realisasi SPJ perjalanan dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada instansi

pemerintah (Aulia et al., 2025). Sementara itu, penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah juga telah menghubungkan akuntabilitas dan transparansi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Pera et al., 2020). Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus pada pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan kesesuaian pengeluaran dan dokumen pendukung SPJ pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fokus tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas diterapkan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pada unit yang diteliti. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan fokus penelitian ini, yaitu “Penerapan Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan bukti atas penggunaan dana yang telah dilakukan dalam suatu kegiatan (Jayanti & Setiyani, 2022). Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, pertanggungjawaban diperlukan untuk menunjukkan bahwa penggunaan dana dapat dijelaskan melalui proses pelaporan dan informasi keuangan yang tersedia (Fitra et al., 2023). Proses pertanggungjawaban keuangan perlu didukung dengan pencatatan transaksi dan bukti pertanggungjawaban yang lengkap agar penggunaan dana dapat ditelusuri dan mendukung tertibnya pengelolaan keuangan daerah (Sitinjak et al., 2023).

Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai untuk menjalankan tugas kedinasan berdasarkan penugasan dari instansi. Pelaksanaan kegiatan tersebut menimbulkan biaya yang perlu dicatat dalam sistem akuntansi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Septiani & Rinanda, 2025). Pertanggungjawaban perjalanan dinas perlu didukung oleh dokumen dan bukti pengeluaran yang sesuai agar transaksi yang dicatat dapat diperiksa dan ditelusuri (Hakim & Hidayah, 2026). Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban juga menjadi bagian

penting dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan biaya perjalanan dinas dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Sipayung et al., 2025).

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas

(Fitriansyah & Rahmadani, 2023) menyatakan bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas merupakan bagian dari penatausahaan keuangan yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPJ perjalanan dinas digunakan sebagai bukti atas penggunaan dana dan perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti surat tugas, surat perjalanan dinas, tiket, bukti penginapan, kuitansi, serta bukti pengeluarannya lainnya. Kesesuaian bukti dan proses validasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengendalian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berkaitan dengan kewajiban pihak yang mengelola dana untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban atas menggunakan sumber daya keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. (Kromen et al., 2023) menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah bersama dengan transparansi untuk mendukung pengelolaan keuangan dengan baik. Penerapan akuntabilitas dapat didukung melalui pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disertai dengan bukti yang dapat diperiksa (Duinkerken et al., 2023). Dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, kesesuaian antara pengeluaran dan dokumen pendukung diperlukan untuk menunjukkan bahwa biaya yang dicatat memiliki dasar yang jelas. Pengarsipan dokumen juga diperlukan agar bukti pertanggungjawaban tetap tersedia ketika dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan kondisi dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, terutama ketika penelitian berfokus pada proses yang berlangsung (Hanin & Kamilah, 2024). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan proses yang ditemukan dalam objek penelitian secara sistematis sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan (Sulistiani et al., 2024). Penelitian dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Objek penelitian berfokus pada pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas, khususnya penggunaan anggaran, pengeluaran perjalanan dinas, kesesuaian pengeluaran dengan dokumen pendukung, serta kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang menangani pertanggungjawaban SPJ perjalanan dinas serta melalui observasi terhadap proses pertanggungjawaban yang berlangsung di lapangan. Wawancara dalam penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai kondisi dan proses yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Fikri & Baitussalam, 2025). Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas, seperti Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket, boarding pass, bukti penginapan, dan dokumen pendukung pengeluaran lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan proses yang berkaitan dengan objek penelitian melalui pengamatan secara langsung di lapangan (Rohmah et al., 2024). Wawancara dilakukan dengan pegawai yang menangani SPJ untuk memperoleh informasi mengenai proses pertanggungjawaban, kelengkapan dokumen, kesesuaian nominal, serta penyesuaian apabila terdapat perbedaan antara dokumen pendukung dan rincian biaya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian agar informasi yang diperoleh dapat disajikan secara sistematis. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasi dan menafsirkan data untuk menemukan pola atau informasi yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian mengenai penerapan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas, kesesuaian pengeluaran dengan dokumen pendukung, dan kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan PertanggungJawaban Keuangan Perjalanan Dinas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penugasan, pelaksanaan perjalanan, dan pengeluaran yang terjadi selama perjalanan. Dokumen yang digunakan disesuaikan dengan jenis perjalanan dan biaya yang dikeluarkan. Adapun dokumen pendukung yang ditemukan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Dokumen Pendukung Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

No.	Dokumen	Fungsi dalam Pertanggungjawaban
1.	Surat Perintah Tugas (SPT)	Menunjukkan dasar penugasan pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
2.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	Menunjukkan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan penugasan.
3.	Tiket perjalanan	Menjadi bukti biaya transportasi perjalanan, seperti tiket pesawat atau bus.
4.	Boarding pass	Menjadi bukti biaya transportasi pesawat telah dilaksanakan.
5.	Bukti penginapan/bill hotel	Menunjukkan biaya penginapan yang dikeluarkan selama perjalanan apabila dibebankan pada anggaran daerah.
6.	Bukti transportasi lokal	Menunjukkan biaya transportasi loka, seperti perjalanan dari rumah menuju bandara atau dari bandara menuju tempat tujuan.
7.	Bukti sewa kendaraan	Menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan kendaraan sewaan.

8.	Nota pembelian BBM	Menjadi bukti pengeluaran bahan bakar apabila perjalanan menggunakan kendaraan kantor.
----	--------------------	--

Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2026

Berdasarkan Tabel 1, pertanggungjawaban perjalanan dinas didukung oleh dokumen yang berbeda sesuai dengan jenis transportasi dan pengeluaran yang terjadi. Pada perjalanan menggunakan pesawat, misalnya, dokumen dapat berupa tiket pulang-pergi, boarding pass, bukti transportasi lokal, dan bukti penginapan apabila biaya hotel dibebankan pada anggaran daerah. Sementara itu, perjalanan menggunakan bus didukung dengan tiket perjalanan dan bukti penginapan. Untuk penggunaan kendaraan sewaan digunakan bukti sewa kendaraan, sedangkan perjalanan menggunakan kendaraan kantor didukung dengan nota pembelian BBM.

Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban karena setiap pengeluaran perlu memiliki bukti yang dapat menunjukkan penggunaan dana. Hasil wawancara dengan pegawai yang menangani SPJ menunjukkan bahwa apabila masih terdapat dokumen yang belum lengkap, dokumen tersebut perlu dilengkapi sebelum pertanggungjawaban diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan keberadaan dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

B. Kesesuaian Pengeluaran dengan Dokumen Pendukung

Selain memeriksa kelengkapan dokumen, pertanggungjawaban perjalanan dinas juga memperhatikan kesesuaian nominal antara rincian biaya dengan bukti pengeluaran. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai yang dicantumkan dalam pertanggungjawaban memiliki dasar pada dokumen pendukung yang tersedia.

Tabel 2. Pemeriksaan Dokumen dan Kesesuaian Pengeluaran

No.	Aspek yang Diperiksa	Kondisi yang Ditemukan	Tindakan
-----	-------------------------	---------------------------	----------

1.	Kelengkapan dokumen	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap pada beberapa berkas	Dokumen dilengkapi sebelum pertanggungjawaban diselesaikan
2.	Kesesuaian nominal	Terdapat kemungkinan perbedaan nominal antara rincian biaya dan bukti pengeluaran	Dilakukan penyesuaian berdasarkan selisih yang ditemukan.
3.	Kesesuaian bukti dengan pengeluaran	Bukti pengeluaran diperiksa berdasarkan jenis biaya pertanggungjawabkan	Bukti digunakan sebagai dasar pemeriksaan pengeluaran
4.	Penyimpanan dokumen	SPJ yang telah lengkap disimpan sebagai arsip	Dokumen diarsipkan pada bagian terkait

Sumber: Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2026.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen dan kesesuaian nominal menjadi bagian yang diperhatikan dalam penyelesaian SPJ perjalanan dinas. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, berkas tersebut perlu dilengkapi terlebih dahulu. Selain itu, apabila ditemukan perbedaan antara nominal pada rincian biaya dengan bukti pendukung, dilakukan penyesuaian berdasarkan selisih yang ditemukan. Dengan demikian, pemeriksaan SPJ tidak hanya melihat ada atau tidaknya dokumen, tetapi juga memperhatikan kesesuaian antara nilai pengeluaran dan bukti yang mendukungnya.

C. Pertanggungjawaban Keuangan dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Pertanggungjawaban perjalanan dinas berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena penggunaan dana dapat ditunjukkan melalui dokumen dan bukti pengeluaran yang tersedia. Kelengkapan dokumen, pemeriksaan nominal, serta penyesuaian apabila terdapat perbedaan menjadi bagian dari proses untuk memastikan bahwa nilai yang dipertanggungjawabkan memiliki dasar yang jelas.

Berdasarkan hasil observasi, setelah dokumen SPJ dinyatakan lengkap, dokumen tersebut diarsipkan pada bagian yang berkaitan. Arsip SPJ juga tersedia pada Bagian Tata Usaha dan dapat digunakan sebagai dokumen ketika diperlukan dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait. Pengarsipan tersebut membantu menjaga ketersediaan bukti pertanggungjawaban sehingga penggunaan dana perjalanan dinas dapat ditelusuri kembali berdasarkan dokumen yang telah disimpan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas pada Bagian Pemerintahan dilakukan melalui pengumpulan dokumen, pemeriksaan kelengkapan, pengecekan kesesuaian nominal, penyesuaian apabila terdapat perbedaan, dan pengarsipan dokumen. Rangkaian tersebut mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan karena setiap pengeluaran perjalanan dinas memiliki dokumen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan menelusuri penggunaan dana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kelengkapan dokumen penugasan, pelaksanaan perjalanan, dan bukti pengeluaran sesuai dengan jenis perjalanan dinas. Pemeriksaan pertanggungjawaban tidak hanya memperhatikan kelengkapan dokumen, tetapi juga kesesuaian nominal antara rincian biaya dengan bukti pengeluaran. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, dokumen tersebut perlu dilengkapi, sedangkan apabila ditemukan perbedaan nominal dilakukan penyesuaian berdasarkan selisih yang ditemukan. Dokumen SPJ yang telah lengkap kemudian diarsipkan sehingga dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dan ditelusuri kembali apabila diperlukan. Penerapan tersebut mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan karena penggunaan anggaran perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen dan bukti pengeluaran yang tersedia. Untuk mendukung proses tersebut, Bagian Pemerintahan disarankan tetap melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesesuaian nominal sebelum SPJ diselesaikan serta menjaga pengarsipan dokumen secara teratur agar mudah ditemukan ketika diperlukan dalam proses pemeriksaan atau penelusuran kembali.

DAFTAR REFERENSI

- Adventy, M. I. Y., Azhar, Putra, R., & Putri, C. A. (2024). Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas Di Analysis of the Official Travel Administration Process at the Secretariat of the Regional People ' s Representative Council of South Sumatra Province. *PERSPEKTIF Available*, 13(2), 392–400. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10941>
- Ananda, A. R., & Nafi'ah, B. A. (2023). Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur Accountability in the Implementation of the Governor ' s Office Travel Accountability Letter in the Office of the Governor of Eas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2). <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4275>
- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 7(5), 35–43. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)
- Aulia, R., Fitaloka, D., & Nawangsari, E. R. (2025). Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3710–3721. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.9323>
- Duinkerken, J. C. N., Tinangon, J. J., & Budiarto, N. S. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 309–319. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3229>
- Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Bappenas Working Papers*, 8(3), 460–484. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411>
- Fikri, M., & Baitussalam, M. I. (2025). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan: Studi Kualitatif pada UMKM Kota Surabaya. *HARAMAIN: Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(03), 142–150. <https://doi.org/10.66931/jmb-216>
- Fitra, H., Mulyani, E., Taqwa, S., Halmawati, & Agustin, H. (2023). Tinjauan Manajemen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Manajemen Dan Wirausaha*, 5(1). <https://doi.org/10.24036/jkmw02145230>

- Fitriansyah, D., & Rahmadani, I. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas Di Setdakab Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 3(1), 22–26. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v3i1.6255>
- Hakim, H. R., & Hidayah, E. (2026). Analisis Risiko dan Efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Akun Belanja Perjalanan Dinas di Sekretariat Jenderal XYZ. *Journal of Social and Economics Research*, 8(1). <https://doi.org/10.54783/jser.v8i1.1491>
- Hanin, H. F., & Kamilah, K. (2024). Cash Disbursement Accounting Systems and Procedures from a Sharia Accounting Perspective. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 147–154. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2479>
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/264500/pmk-no-119-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com
- Jayanti, A. T., & Setiyani, R. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus. *Business and Accounting Education Journal*, 3(2), 241–252.
- Khairunnisak, B. I., & Suryantara, A. B. (2025). PROSEDUR PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SURAT. *Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prakbis.v1i1.2706>
- Kromen, L. B., Manafe, A., & Perseveranda, M. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 460–468. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4.1463>
- Pera, C. M. R. de V., Ga, L. L., & Kiak, N. T. (2020). The Effect of Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 10(12), 721–729. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.1012.721.729>
- Putri S, N. A. D., & Susandra, F. (2025). Prosedur Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas (Perjadin) Pegawai pada Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(10), 8098–8104. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i10.21599>
- Rohmah, A. B. Nu., Putri, R. A., Pratiwi, R., & Hermastho, B. (2024). Pendekatan Blue Ocean Strategi Dalam Persaingan Bisnis di Kota Semarang (Studi Empiris : Soto Sawah Mbak Tutik). *Jurnal Manajemen*, 11(2), 1–9.

<https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v1i1i2>

- Septiani, R., & Rinanda, Y. (2025). Penerapan Sistem Akuntansi Atas Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 106–114. <https://doi.org/10.62194/9eehhg05>
- Sipahutar, B. P. S., Rahwani, D. A., & Zebua, D. F. A. (2024). Literature Study of the Impact of Regional Financial Management, Accountability, and Transparency on Regional Government Financial Performance. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(4), 218–222. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v3i4.712>
- Sipayung, B., Rosmini, Wahyudi, A., & Suyanto. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terhadap Akuntabilitas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1514–1524. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i2.7469>
- Sitinjak, T. M., Candradewini, C., & Munanjat, M. D. E. (2023). Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Transaksi Non Tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi (Studi pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 15(1), 48–54. <https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.41759>
- Sulistiani, R., Musa, C. I., & Haeruddin, M. I. W. (2024). Analisis Risiko dan Tantangan yang Dihadapi Partisipan dalam Live Streaming TikTok dengan Pendekatan Teori Stimulus Organism-Respon (S-O-R). *Jurnal Manajemen*, 4(2), 168–183. <https://doi.org/10.26858/jm.v4i2.61221>
- Sumeleh, S. A. D., Sabijono, H., & Kapojos, P. M. (2024). Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk Perjalanan Dinas Berdasarkan PMK Nomor 119 Tahun 2023 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. <https://doi.org/10.58784/rapi.215>